



TRIBUN PONTIANAK/MADROKIB/IST

SILPA - Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyerahkan dokumen pertanggungjawaban APBD 2019 kepada Ketua DPRD Pontianak, Satarudin.

WTP Sembilan Kali

PEMERINTAH Kota Pontianak kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke sembilan kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pontianak tahun anggaran 2019.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono di Pontianak, akhir bulan lalu menyatakan hasil yang dicapai merupakan bukti keseriusan dalam pengelolaan keuangan di lingkup Pemkot Pontianak.

Dia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar menjalankan anggaran dengan akuntabel, serius

dan sesuai dengan aturan yang berlaku. OPD juga diminta menyesuaikan dengan kebijakan yang baru diterbitkan oleh pemerintah pusat.

"Untuk tahun ini kami akan lebih selektif dan teliti lagi dalam masalah anggaran," katanya.

Kendati meraih opini WTP, diakuiinya ada beberapa catatan atas LHP tersebut yang akan ditindaklanjuti. Ia menyebut, catatan dari BPK yang akan ditindaklanjuti diantaranya terkait administrasi seperti pengelolaan aset.

"Saat ini kami juga telah melakukan inventarisasi aset-aset yang ada, yakni

dengan membenahi pengarsipan, pendataan maupun pensertifikatan terhadap aset-aset yang ada," kata Edi.

Menurut dia, hasil yang diperoleh hari ini merupakan LHP LKPD tahun anggaran 2019 sebelum pandemi COVID-19. Sementara untuk laporan keuangan tahun 2020, auditnya akan dilakukan pada tahun 2021 mendatang.

Sebagai catatan, Pemkot Pontianak telah berhasil meraih opini WTP dari BPK RI selama sembilan tahun berturut-turut, yakni laporan keuangan tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019. **(dan)**